



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE

# RINCIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
**MICHAEL THUNGARI, S.E., M.M**

WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
**TENDRIS BULAHARI**



## ARTI LAMBANG

- **Perisai** :  
dalam bahasa Daerah Satal disebut Kelung adalah pelindung diri dari bahaya.
- **Bintang** :  
adalah lambang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan. Pribumi Kepl. Satal mengenal “ Ghenggonalangi “ (Tuhan) sebagai sumber kehidupan dan pertandanya adalah Bintang.
- **Bininta** :  
sebuah perahu zaman kuno yang dipakai sebagai sarana penghubung antarpulau dan melambangkan kemakmuran dan pertahanan.
- **Sebulir buah pala dan Setangkai mayang buah Kelapa :**  
Sebulir buah pala dengan jumlah 17 (tujuh belas) biji, setangkai mayang bunga kelapa dan delapan buah cengkih sebagai dasar kemakmuran dan kejayaan, serta jumlah 45 (empat puluh lima) pada bunga kelapa mengartikan kesatuan yang jelas dan tak terpisahkan dengan NKRI berdasarkan UUD 1945 yang diproklamasikan tanggal 17-8-1945.
- **Somahe Kai Kehage :**  
Motto (semboyan) Daerah Satal yang berarti tantangan / kesulitan hidup hanya dapat diatasi dengan usaha keras / rajin.

**FOTO BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**



**MICHAEL THUNGARI, S.E., M.M**  
**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

**FOTO WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**



**THENDRIS BULAHARI**  
**WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipersembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dokumen ini disusun sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LPPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 menyajikan kesatuan hasil pengukuran kinerja yang mencakup Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Dasar, Laporan Keuangan dan Inovasi Daerah.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi utama bagi Pemerintah Pusat dan Masyarakat dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) serta menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ke arah yang lebih baik.

Tahuna, 16 Maret 2025

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL HUNGARI, S.E., M.M

## DAFTAR ISI

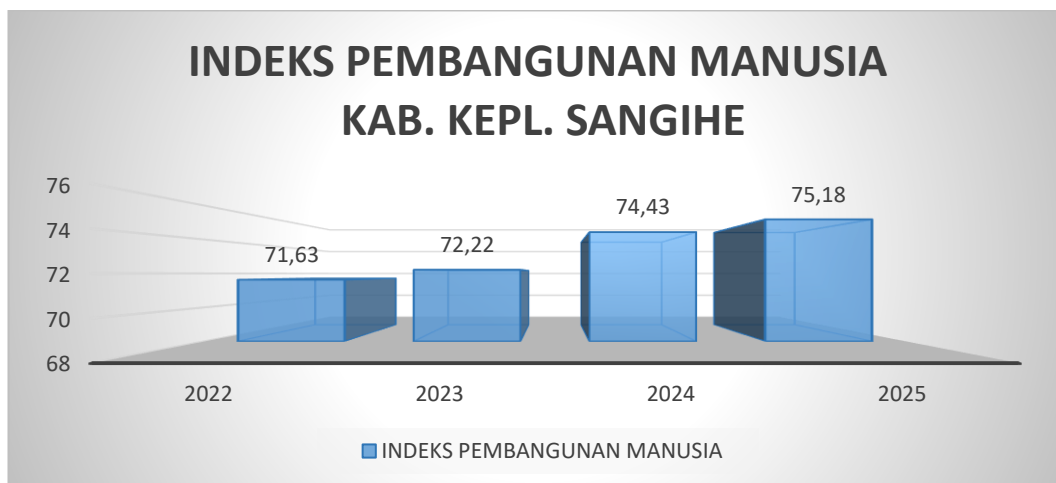
<b>ARTI LAMBANG</b> .....	<b>i</b>
<b>FOTO BUPATI KEPULAUAN SANGIHE</b> .....	<b>ii</b>
<b>FOTO WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>CAPAIAN KINERJA MAKRO</b> .....	<b>1</b>
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	1
B. Angka kemiskinan .....	3
C. Angka pengangguran .....	4
D. Pertumbuhan ekonomi .....	5
E. Pendapatan per kapita .....	6
F. Gini Ratio atau Rasio Gini.....	7
<b>RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR</b> .....	<b>9</b>
A. Indikator Kinerja Kunci .....	9
<b>HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KKEUANGAN PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA</b> .....	<b>28</b>
<b>RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH</b> .....	<b>31</b>
<b>INOVASI DAERAH</b> .....	<b>47</b>
A. Inovasi Daerah .....	47
B. Penghargaan yang diterima.....	48
<b>PENUTUP</b> .....	<b>50</b>


## CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator	Capaian 2024	Capaian 2025	Perubahan
1	2	4	3	$5 = ((3-4)/4) * 100\%$
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,43	75,18	1,01
2	Angka Kemiskinan	10,84	10,91	0,65
3	Angka Pengangguran	2,50	2,64	5,60
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,320	5,67	6,58
5	Pendapatan per Kapita	43.190.000	47.330.000	9,59
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,321	0,312	-2,80

Sumber: Badan Pusat Statistik

### A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



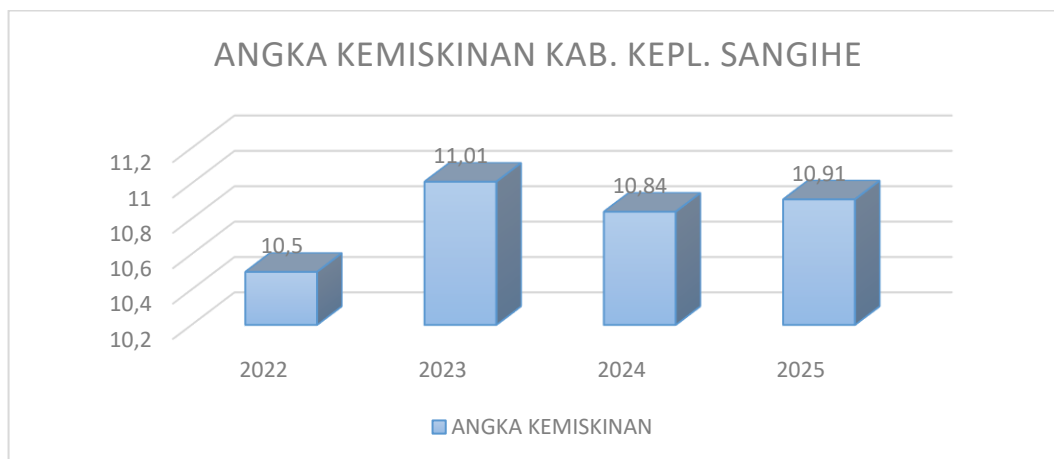


Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan menggembirakan selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di angka 71,63, kemudian mengalami peningkatan menjadi 72,22 pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian 74,43, dan terus berlanjut mencapai 75,18 pada tahun 2025.

Pertumbuhan IPM yang terjadi selama empat tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang sangat baik, terutama pada tahun 2024 yang mencatat lonjakan sebesar 2,21 poin. Secara keseluruhan, dalam periode 2022-2025, IPM Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan sebesar 3,55 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kemajuan yang pesat dan berkelanjutan.

Konsistensi peningkatan IPM setiap tahunnya, terutama lompatan signifikan pada tahun 2024, mencerminkan efektivitas kebijakan dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Capaian IPM sebesar 75,18 pada tahun 2025 menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada kategori Tinggi dalam indeks pembangunan manusia. Namun, pencapaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas program-program pembangunan manusia, guna memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

## B. Angka kemiskinan

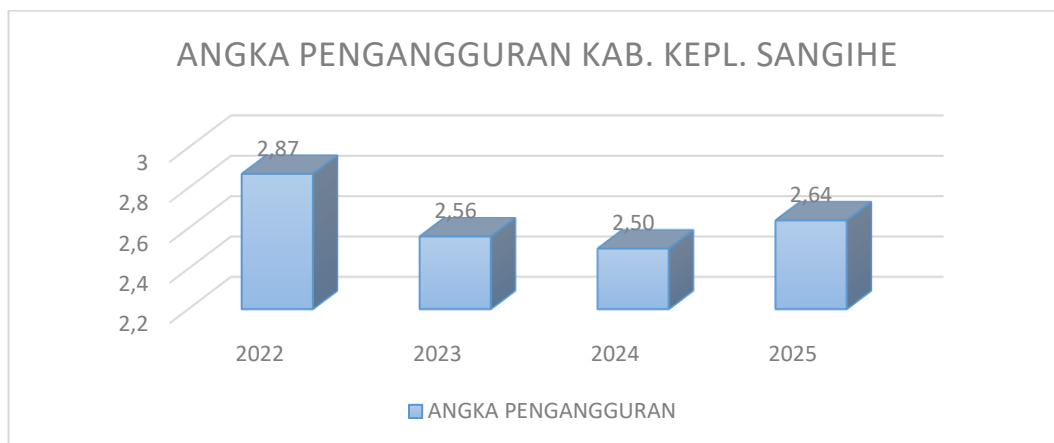


Kabupaten Kepulauan Sangihe, capaian Angka Kemiskinan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, angka kemiskinan berada di level 10,50 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 11,01 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 10,84 persen, namun kembali mengalami kenaikan tipis menjadi 10,91 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, dalam periode 2022-2025, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami peningkatan sebesar 0,41 poin. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 sebesar 0,51 poin mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi, seperti dampak kondisi ekonomi makro atau faktor lainnya. Meskipun pada tahun 2024 berhasil diturunkan, kenaikan kembali pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fondasi pengurangan kemiskinan masih perlu diperkuat.

Tren yang fluktuatif ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diperlukan evaluasi komprehensif terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan.

### C. Angka pengangguran



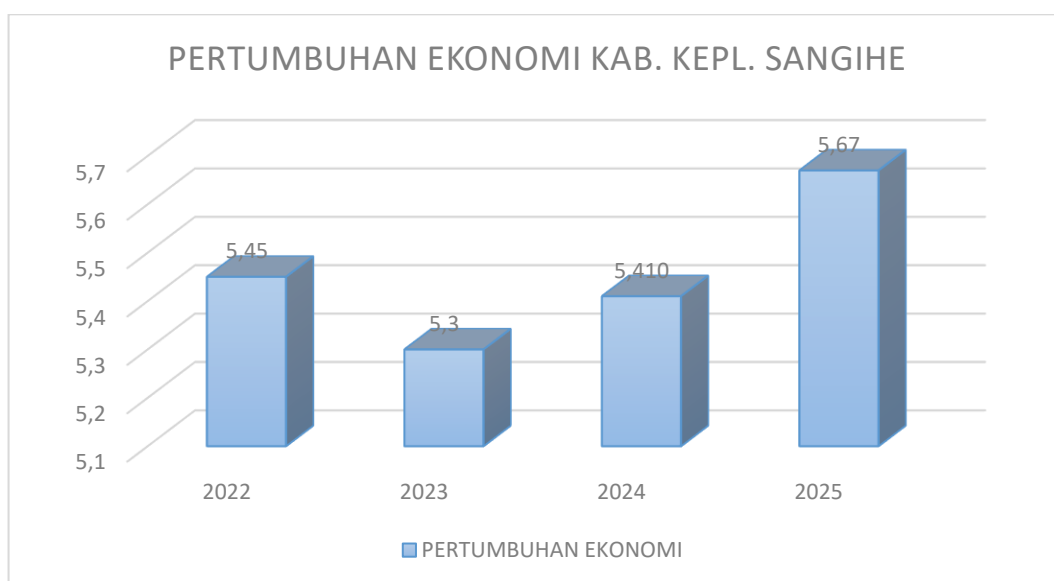
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren yang cukup menggembarakan dengan beberapa fluktuasi selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran berada di angka 2,87 persen, kemudian berhasil diturunkan menjadi 2,56 persen pada tahun 2023. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 2,50 persen, namun mengalami kenaikan tipis menjadi 2,64 persen pada tahun 2025 dengan kategori sangat baik.

Secara keseluruhan, dalam periode 2022-2025, tingkat pengangguran di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan sebesar 0,23 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe relatif dalam kondisi yang cukup baik, dengan tingkat pengangguran yang tergolong rendah. Penurunan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja telah berjalan dengan cukup efektif. Namun, kenaikan kecil pada tahun 2025 sebesar 0,14 poin perlu menjadi perhatian untuk memastikan bahwa tren penurunan dapat dipertahankan.

Tingkat pengangguran yang relatif rendah di bawah 3 persen menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terserap dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan capaian ini melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor-sektor ekonomi

potensial, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja baru. Program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja juga perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

#### D. Pertumbuhan ekonomi



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun cenderung progresif. Pada tahun 2022, perekonomian daerah tercatat tumbuh sebesar 5,45%, namun angka ini mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023 menjadi 5,3%. Penurunan tipis ini mengindikasikan adanya tantangan ekonomi tertentu yang memengaruhi laju pertumbuhan di tahun tersebut sebelum akhirnya kembali memasuki fase pemulihan.

Memasuki tahun 2024, kondisi ekonomi mulai menunjukkan tren positif dengan kenaikan menjadi 5,41%. Upaya pemulihan ini terus berlanjut hingga tahun 2025, di mana pertumbuhan ekonomi melonjak signifikan mencapai angka 5,67%. Capaian pada tahun 2025 ini merupakan titik tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang menandakan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berjalan secara efektif dan mampu mendorong akselerasi yang kuat.

Secara keseluruhan, data ini menyimpulkan bahwa meskipun sempat terjadi perlambatan pasca-2022, Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil bangkit dan menutup periode 2025 dengan kinerja ekonomi yang sangat baik. Peningkatan yang konsisten dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya stabilitas dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

#### E. Pendapatan per kapita



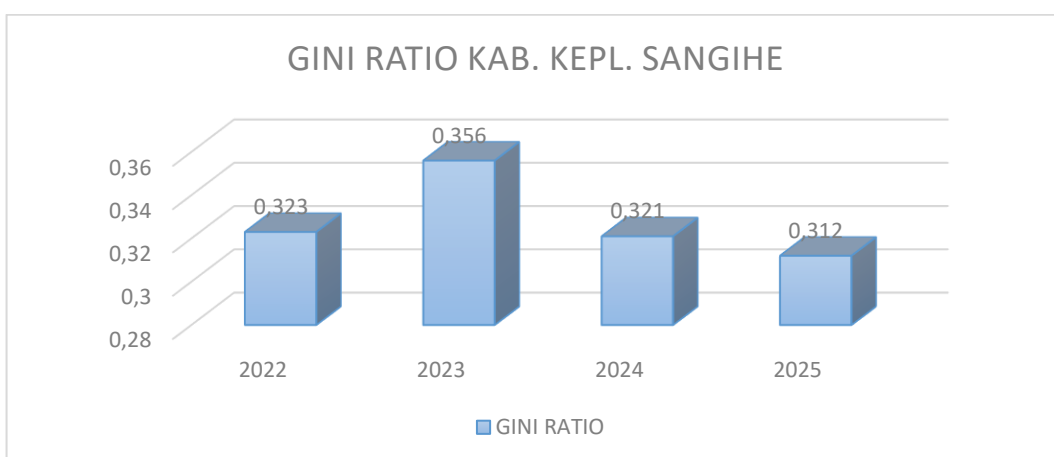
Pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif selama periode empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, pendapatan perkapita tercatat sebesar Rp37.265.368,69, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp39.830.000,00 pada tahun 2023. Pertumbuhan yang stabil di awal periode ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga secara bertahap.

Memasuki tahun 2024 dan 2025, akselerasi peningkatan pendapatan perkapita terlihat semakin kuat. Pada tahun 2024, angka tersebut naik menjadi Rp43.220.000,00, dan terus melonjak hingga mencapai Rp47.330.000,00 pada tahun 2025. Kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa

program-program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi daerah berhasil meningkatkan produktivitas serta taraf hidup masyarakat secara merata.


Secara keseluruhan, capaian Pendapatan Perkapita Tahun 2025 yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut membuktikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

#### F. Gini Ratio atau Rasio Gini



Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, capaian Gini Ratio menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik selama periode 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, Gini Ratio berada di angka 0,323, kemudian mengalami peningkatan menjadi 0,356 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 0,321, dan terus menurun menjadi 0,312 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, dalam periode 2022-2025, Gini Ratio Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami penurunan sebesar 0,011 poin. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,033 poin mengindikasikan adanya pelebaran ketimpangan pendapatan pada tahun tersebut. Namun, penurunan yang konsisten pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan pendapatan mulai menunjukkan hasil yang positif. Tren penurunan yang terjadi dalam dua



tahun terakhir menjadi sinyal yang menggembirakan bagi upaya pengurangan ketimpangan di daerah ini.

Dengan capaian Gini Ratio sebesar 0,312 pada tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe berada pada kategori yang relatif moderat mendekati angka 0,3 yang merupakan kategori ketimpangan rendah.. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat semakin membaik. Namun, upaya untuk terus menurunkan rasio ini perlu terus dilakukan melalui berbagai kebijakan yang pro-pemerataan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengembangan UMKM, program pemberdayaan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

## RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

### A. Indikator Kinerja Kunci

#### a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100	DIKBUD	
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	DIKBUD	
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	DIKBUD	
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	33,164557	DIKBUD	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah	42,36	DIKBUD	

		Menengah Pertama dalam Kondisi Baik			
2.	Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	0	DINKES	Tidak ada Kematian Ibu saat bersalin Tahun 2025
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	1,6426688		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	93,081761		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	93,0188679		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	95,27		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	95,2715655		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	100		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	62,3419556		

		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91,5059524		
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	59,502647	DINKES	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	88,1583477	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	DINKES	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	100	DINKES	
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	67,5151515	DINKES	

3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66,9897586	PUPRD	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	66,8650172	PUPRD	
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	30,2266245	PUPRD	
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	97,1042271	PUPRD	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	6,477036	PUPRD	

		Pengendalian dan Mitigasi Banjir			
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota	98,4615385	PUPRD	
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100	PUPRD	Tidak adanya permohonan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat berpenghasilan rendah selama tahun 2025
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	100	PUPRD	Surat Ket. Tidak ada Permohonan Persetujuan bangunan Gedung (PBG) selama tahun 2025
		Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis	27,3809524	PUPRD	

		yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	100	PUPRD	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	PERKIMTAN	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	100	PERKIMTAN	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100	PERKIMTAN	
		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	PERKIMTAN	Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran

5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	0	BPBD	Dokumen Kebencanaan sudah melewati batas berlaku
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	100	Satpol PP dan Damkar	
		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,2201563	BPBD	
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37,5	BPBD	

		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50	Satpol PP dan Damkar	
6.	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	94,924812	DINSOS	
		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	37,8461538	DINSOS	
		Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	2,681213	DINSOS	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	-	DINSOS	Tidak ada Gelandangan dan Pengemis di Kab. Kepl. Sangihe
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap	100	DINSOS	

		Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
		Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	11,6286619	DINSOS	

**b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	DISNAKER	
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	10,0917431	DISNAKER	
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100	DISNAKER	

2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	Dinas PP dan PA	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	Dinas PP dan PA	
3.	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15,91133	Dinas Ketahanan Pangan	
4.	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	67,779397	BPKPD	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	4,2378727	PUPRD	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	-	PUPRD	Tidak ada, karena belum ada RDTR yang ditetapkan
5.	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan	9,0909091	DLH	

		Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	21,7949342	DLH	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	100	Dinas DUKCAPIL	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	86,2937967	Dinas DUKCAPIL	
		Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	100	Dinas DUKCAPIL	
		Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	97,3943892	Dinas DUKCAPIL	
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	Dinas DUKCAPIL	
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	Dinas DUKCAPIL	
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100	Dinas DUKCAPIL	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	66,6666667	Dinas PEMDES	

		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	20	Dinas PEMDES	
		Persentase Fasilitas Kerja Sama Desa	-	Dinas PEMDES	Belum ada desa yang melaksanakan kerjasama
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	93,1818182	Dinas PP dan KB	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	62,623317	Dinas PP dan KB	
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	101,975128	Dinas PP dan KB	
9.	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,735	Dinas Perhubungan	
		Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,47	Dinas Perhubungan	
		Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	-	Dinas Perhubungan	Tidak ada Perusahaan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Sangihe
10.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	34,375	Dinas Kominfo	

		Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	85,7142857	Dinas Kominfo	
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Dinas Kominfo	
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	- 47,7979467	Dinas Koperasi dan UKM	
		Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	100	Dinas Koperasi dan UKM	
12.	Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	71,4146908	DPMPTSPD	
		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	519,391551	DPMPTSPD	
		Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	160,92	DPMPTSPD	
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	160,924856	DISPORA	
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	24,6806524	DISPORA	

		Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
		Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	-	DISPORA	Tidak ada undangan oleh pemprov kepada atlit untuk mengikuti seleksi peserta pemusatan Latihan, untuk tahun 2025 pembinaan atlit berfokus pada pemusatan Latihan Pekan Olahraga Prov
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	45,4545455	DISPORA	
14.	Statistik	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	100	BAPELITBANGDA	
15.	Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	-	Dinas Kominfo	Nilai indeks kamibelum dapat disajikan karena kurangnya dukungan manajemen, keterbatasan SDM ahli,

					belum ada standarisasi penilaian dan target realistis dan penilaian subjektif
16.	Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100	DIKBUD	
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	1384,84848	DIKBUD	
17.	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	59,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	0,1172	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
18.	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	8,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

### c. Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kelautan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	106,636461	Dinas Perikanan	
		Angka Konsumsi Ikan	64,3	Dinas Perikanan	

2.	Pariwisata	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	100	Dinas Pariwisata	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	364,516129	Dinas Pariwisata	
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	4,65	Dinas Pariwisata	
3.	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6,7816971	Dinas Pertanian	
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	1,1350593	Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-1,6486073	Dinas Pertanian	
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100	Dinas Pertanian	
4.	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	0,6619781	Dinas PERINDAG	
5.	Perindustrian	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	-	Dinas PERINDAG	Belum bisa ditetapkan presentase karena belum ada Rencana Induk Pembangunan

					Industri (RIPK)
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1,7322835	Dinas PERINDAG	
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	17,2668513	Dinas PERINDAG	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	2,3542568	Dinas PERINDAG	

#### d. Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bidang Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	BAPELITBANDA	
2.	Bidang Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah	57,1973716	BPKPD	

		Ditentukan Penggunaannya			
		Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	9,0807817	BPKPD	
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	27,2972041	BPKPD	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	23,3618497	BPKPD	
3.	Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	65,2173913	BKPSDMD	
4.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	100	BAPELITBANG	
5.	Bidang Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
		Manajemen Risiko Indeks	2	Inspektorat	
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	74,1284404	Inspektorat	

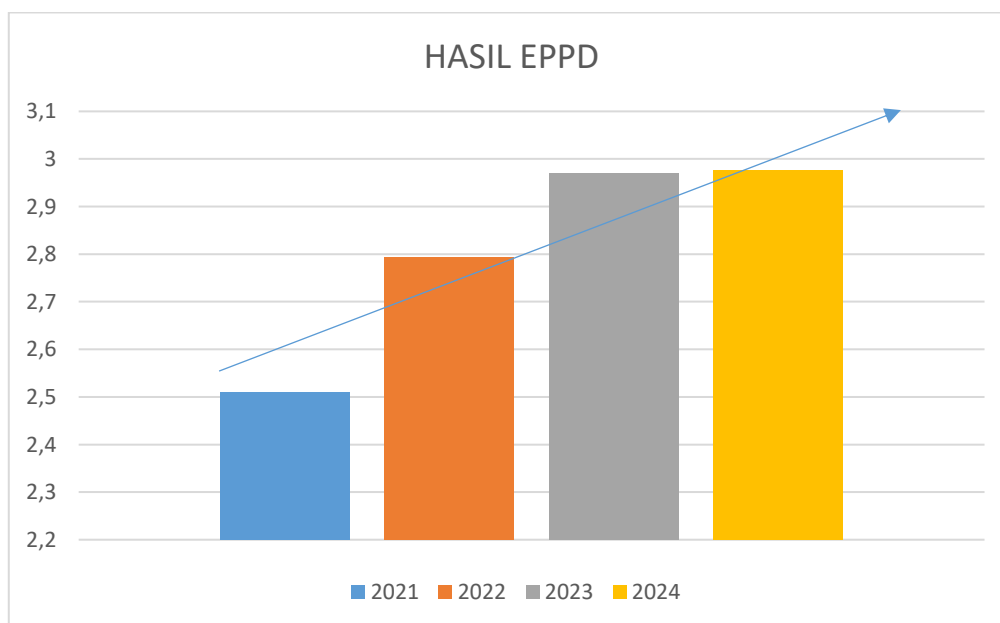
6.	Bidang Pengadaan	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	35,56	Bagian PBJ Setda	
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	21,62	Bagian PBJ Setda	
		Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	20,63	Bagian PBJ Setda	
7.	Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1	BPKPD	Ket 1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	23,8095238	Bagian Hukum Setda	
8.	Bidang Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	90,56	Bagian Organisasi Setda	

## HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KKEUANGAN PEMERINTAH TAHUN SEBELUMNYA

### A. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya

#### a. Hasil EPPD

NO	TAHUN	HASIL EPPD	KET
1.	2021	2,51	
2.	2022	2,7930	
3	2023	2,97930	
4	2024	2,9762	



Berdasarkan data hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terlihat adanya dinamika performa yang menunjukkan tren positif secara umum.

Pada tahun 2021, capaian nilai EPPD tercatat sebesar 2,51. Angka ini kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 2,7930, yang mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek tata kelola pemerintahan dan pemenuhan indikator kinerja kunci di lingkup daerah.

Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mencapai titik performa tertinggi dengan perolehan nilai sebesar 2,9793. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi koreksi sangat tipis menjadi 2,9762, namun angka tersebut menunjukkan tingkat konsistensi kinerja yang stabil dan masih berada pada level yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun awal periode evaluasi.

Secara keseluruhan, stabilitas angka di angka mendekati 3,00 pada dua tahun terakhir memberikan gambaran bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berjalan di jalur yang tepat (*on the right track*). Capaian ini menjadi modalitas penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas nilai LPPD di masa mendatang demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

#### **b. Opini Laporan Keuangan**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>OPINI LAPORAN KEUANGAN</b>
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5.	2018	WTP

6.	2019	WTP
7.	2020	WTP
8.	2021	WTP
9.	2022	WTP
10.	2023	WTP
11.	2024	WTP
12.	2025	Dalam Proses Audit

Berdasarkan data historis, Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 11 tahun berturut-turut, terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung oleh sistem pengendalian internal yang sangat efektif.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten dalam periode yang panjang (2014–2024) merupakan indikator kuat atas integritas dan profesionalisme jajaran aparatur pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prestasi ini juga menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan serta transparansi yang berkelanjutan dalam pertanggungjawaban publik.

Untuk periode laporan keuangan tahun 2025, saat ini statusnya masih "Dalam Proses Audit". Mengingat rekam jejak yang sangat positif selama 11 tahun terakhir, pemerintah daerah memiliki landasan yang solid untuk kembali meraih opini terbaik. Hasil audit tahun 2025 ini nantinya akan menjadi penentu keberlanjutan tradisi WTP di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas keuangan demi kesejahteraan masyarakat Sangihe.

## RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

### A. Pendapatan Daerah

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	<b>Pendapatan Daerah</b>	902.065.570.267,15	875.735.790.466,12
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79.786.354.404,08	79.520.222.176,65
4.2	Pendapatan Transfer	813.228.570.450,07	787.268.913.567,47
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.050.645.413,00	8.946.654.722,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 sebesar Rp. 902.065.570.267,15 dengan realisasi sebesar Rp. 875.735.790.466,12 atau 97,08%. yang terdiri dari :

#### ➤ Pendapatan Asli Daerah

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	79.786.354.404,08	79.520.222.176,65

4.1.01	Pajak Daerah	15.936.800.000,00	14.621.322.836,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.413.422.111,08	6.191.712.382,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.751.218.428,00	1.751.218.428,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.684.913.865,00	56.955.968.530,65

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran Rp. 79.786.354.404,08 dan realisasi sebesar Rp. 79.520.222.176,65 atau 100%.

➤ **Pendapatan Transfer**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	813.228.570.450,07	787.268.913.567,47
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782.348.637.467,00	760.836.020.011,47
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	30.879.932.983,07	26.432.893.556,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Pendapatan Transfer dengan anggaran Rp. 813.228.570.450,07 dan realisasi sebesar Rp. 787.268.913.567,47 atau 97%.

➤ **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	9.050.645.413,00	8.946.654.722,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan	9.050.645.413,00	8.946.654.722,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan anggaran sebesar Rp.9.050.645.413,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.946.654.722,00 atau 99%.

**B. Belanja Daerah**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	926.196.498.038,15	825.466.282.401,40
5.1	Belanja Operasi	686.377.441.251,02	630.837.526.826,62
5.2	Belanja Modal	6.517.270.000,00	6.317.579.124,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	24.571.535.369,00	23.836.120.382,78
5.4	Belanja Transfer	2.497.977.150,00	2.456.084.200,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Komponen belanja dengan total anggaran sebesar Rp. 926.196.498.038,15 dengan realisasi sebesar Rp. 825.466.282.401,40 atau 89%. Terdiri dari:

➤ **Belanja Operasi**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	686.377.441.251,02	630.837.526.826,62
5.1.01	Belanja Pegawai	423.961.446.279,79	390.590.855.059,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.672.068.210,23	219.712.923.896,15
5.1.03	Belanja Bunga	10.481.084.611,00	10.526.739.921,47
5.1.05	Belanja Hibah	10.138.342.150,00	9.890.007.950,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.163.247.000,00	3.114.603.676,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp. 686.377.441.251,02 dan realisasi sebesar Rp. 630.837.526.826,62 atau 92% yang terdiri dari :

- **Belanja Pegawai**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	423.961.446.279,79	390.590.855.059,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	283.281.341.722,61	261.235.323.038,00

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN ASN	127.938.789.628,18	116.661.823.794,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.580.531.070,00	11.556.788.882,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	137.638.859,00	137.638.859,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.879.986,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	512.265.000,00	488.400.500,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Belanja Pegawai untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 423.961.446.279,79 dengan realisasi Rp. 390.590.855.059,00 atau 92%.

- **Belanja Barang dan Jasa**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.672.068.210,23	219.712.923.896,15
5.1.02.01	Belanja Barang	41.448.342.334,19	35.995.357.795,15
5.1.02.02	Belanja Jasa	99.972.480.667,84	89.547.385.144,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.635.429.201,20	8.279.991.639,00

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	29.414.790.820,00	25.520.210.526,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	1.382.250.000,00	1.336.119.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	13.167.031.392,00	12.845.704.031,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.651.743.795,00	46.188.155.761,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 241.672.068.210,23 dengan realisasi sebesar Rp. 219.712.923.896,15 atau 91%.

- **Belanja Bunga**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>5.1.03</b>	<b>Belanja Bunga</b>	10.481.084.611,00	10.526.739.921,47
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan BANK (LKBB)	10.481.084.611,00	10.526.739.921,47

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Bunga pada Tahun 2025 dengan anggaran Rp.10.481.084.611,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.526.739.921,47 atau 100%

- **Belanja Hibah**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	10.138.342.150,00	9.890.007.950,00
5.1.05.05	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.163.247.000,00	3.114.603.676,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	6.517.270.000,00	6.317.579.124,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	457.825.150,00	457.825.150,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Hibah pada Tahun 2025 dengan anggaran Rp.10.138.342.150,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.890.007.950,00 atau 98%

- **Belanja Bantuan Sosial**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	124.500.000,00	117.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Kepada Individu	124.500.000,00	117.000.000,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 sebesar Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 124.500.000,00 dengan realisasi Rp. 117.000.000,00 atau 94%

➤ **Belanja Modal**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	73.509.965.643,13	69.125.582.490,78
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.198.266.802,13	17.430.868.529,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.069.512.519,00	26.292.204.582,78
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	24.571.535.369,00	23.836.120.382,78

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.960.700,00
--------	----------------------------------	----------------	---------------

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Belanja Modal untuk Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.73.509.965.643,13 dengan realisasi sebesar Rp. 69.125.582.490,78 atau 94%. yang terdiri dari :

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	18.198.266.802,13	17.430.868.529,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.220.000.000,00	1.210.015.430,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.460.670.000,00	3.388.844.998,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.419.516.052,13	4.251.444.112,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	161.412.600,00	161.013.714,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran	195.614.000,00	117.349.589,00

	dan Kesehatan		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	884.027.000,00	883.780.645,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.628.456.137,00	3.546.247.292,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.080.587.808,00	3.030.135.744,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.147.983.205,00	842.037.005,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 18.198.266.802,13 dengan realisasi Rp. 17.430.868.529,00 atau 96%

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	27.069.512.519,00	26.292.204.582,78
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	24.571.535.369,00	23.836.120.382,78
5.2.03.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.497.977.150,00	2.456.084.200,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 27.069.512.519,00 dengan realisasi Rp. 26.292.204.582,78 atau 97%

- **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	26.121.789.522,00	23.377.397.279,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	13.914.696.000,00	13.822.026.600,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.253.839.047,00	5.131.513.860,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	4.516.937.999,00	4.423.856.819,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.436.316.476,00	-

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 26.121.789.522,00 dengan realisasi Rp. 23.377.397.279,00 atau 89%

- **Belanja Modal Aset Tetap lainnya**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.115.896.800,00	2.020.612.100,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000.000,00	99.960.700,00
5.2.05.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.966.423.100,00	1.920.651.400,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 2.115.896.800,00 dengan realisasi Rp. 2.020.612.100,00 atau 95%

- **Belanja Modal Aset lainnya**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.2.06</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	4.500.000,00	4.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud	4.500.000,00	4.500.000,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Belanja Modal Aset Aset lainnya untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.000,00 dengan realisasi Rp. 4.500.000,00 atau 100%

➤ **Belanja Tidak Terduga**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	3.862.185.544,00	873.195.612,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.862.185.544,00	873.195.612,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Tidak Terduga untuk Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 3.862.185.544,00 dengan realisasi sebesar Rp. 873.195.612,00 atau 23%

➤ **Belanja Transfer**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	162.446.905.600,00	151.629.977.472,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.139.320.000,00	2.535.029.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	159.307.585.600,00	149.094.948.472,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah*

Belanja Transfer untuk Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp.162.446.905.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 151.629.977.472,00 atau 93%, yang terdiri dari:

- **Belanja Bagi Hasil**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.4.01</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	3.139.320.000,00	2.535.029.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.593.686.000,00	1.593.686.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.545.634.000,00	941.343.000,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan*

Belanja Bagi Hasil untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 3.139.320.000,00 dengan realisasi Rp. 2.535.029.000,00 atau 81%

- **Belanja Bantuan Keuangan**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
<b>5.4.02</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	159.307.585.600,00	149.094.948.472,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	159.307.585.600,00	149.094.948.472,00

	Kepada Desa		
--	----------------	--	--

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Belanja Bantuan Keuangan untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 159.307.585.600,00 dengan realisasi Rp. 149.094.948.472,00 atau 94%

### C. Pembiayaan Daerah

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
6	<b>Pembiayaan Daerah</b>	41.261.483.407,00	41.261.483.406,65
6.1	Penerimaan Pembiayaan	32.696.205.589,00	32.696.205.588,65
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.433.142.269,00	12.433.142.269,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 41.261.483.407,00 dengan realisasi Rp. 41.261.483.406,65 atau 100% yang terdiri dari :

#### ➤ Penerimaan Pembiayaan

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	32.696.205.589,00	32.696.205.588,65
6.1.01	Sisah Lebih Perhitungan tahun Anggaran Sebelumnya	32.696.205.589,00	32.696.205.588,65

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.32.696.205.589,00 dengan realisasi Rp. 32.696.205.588,65 atau 100%

➤ **Pengeluaran Pembiayaan**

<b>Kode Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
1	2	3	4
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	8.565.277.818,00	8.565.277.818,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.565.277.818,00	8.565.277.818,00

*Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan* Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 8.565.277.818,00 dengan realisasi Rp. 8.565.277.818,00 atau 100%

## INOVASI DAERAH


### A. Inovasi Daerah

No	Inovator (Perangkat Daerah)	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DUKCAPIL MEMBARA	Layanan digital untuk mempercepat pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan secara mandiri.
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	JEMPOL DUKCAPIL	Layanan jemput bola (non-digital) untuk perekaman dokumen kependudukan langsung ke pemukiman warga.
3	Dinas Pendidikan Daerah	Kebun Sekolah Sumber Pendapatan Alternatif	Optimalisasi lahan sekolah untuk kemandirian pangan dan sumber edukasi kewirausahaan siswa.
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	KITA DIDENGAR	Aplikasi digital untuk pemantauan dan konseling program keluarga sejahtera serta pencegahan stunting.
5	Dinas Tenaga Kerja Daerah	SANGIHE SIAP KERJA	Platform digital penyediaan informasi lowongan kerja dan pemetaan kompetensi tenaga kerja lokal.
6	Dinas Perikanan Daerah	Kemitraan CSR Dinas Perikanan	Penguatan modal dan alat tangkap nelayan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	GEBYAR OLAHRAGA MEMBARA	Penyelenggaraan kompetensi rutin untuk menjaring bibit atlet berprestasi di wilayah kepulauan.
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Lapor Bupati Sangihe	Saluran pengaduan masyarakat berbasis digital untuk transparansi dan respon cepat pemerintah.

9	Dinas Pariwisata Daerah	SIPDaWis	Sistem Informasi digital untuk memetakan dan mempromosikan destinasi wisata potensial secara global.
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	SINPERDA	Inovasi tata kelola digital untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengawasan pajak/retribusi daerah.
11	Badan Kepegawaian	SIGAP	Sistem informasi kehadiran dan kinerja digital untuk meningkatkan disiplin serta profesionalisme ASN.
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SIMORA / AMORA	Aplikasi monitoring harga bahan pokok secara real-time untuk menjaga stabilitas inflasi daerah.

## B. Penghargaan yang diterima

- a. Peringkat terbaik tiga Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang se-Provinsi Sulawesi Utara
- b. Di Bidang Administrasi Kependudukan, Dinas DUKCAPIL memperoleh peringkat ke-4 dengan opini kualitas terbaik se-Sulawesi Utara, Penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian Dalam Negeri
- c. Berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi juara 1 pada Acara North Sulawesi investment challenge (nsic) yang diikuti oleh 16 peserta, terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan 1 PD Provinsi Sulawesi Utara
- e. Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjadi daerah satu-satunya di Sulawesi Utara yang menerima penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (SWASTI SABA) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2025
- f. Piagam Penghargaan Anugerah Mapalus Pendidikan Sulawesi Utara Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe peraih terbaik dalam kategori forum koordinasi pendidikan daerah

- 
- g. Piagam penghargaan anugerah mapalus pendidikan Sulawesi Utara Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe peraih terbaik Kategori Pemerintah Daerah dengan Inovasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
  - h. Piagam Penghargaan Anugerah mapalus pendidikan Sulawesi Utara Tahun 2025 diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Peraih Terbaik Kategori Dinas Pendidikan dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Terbaik
  - i. Penghargaan Universal Health Coverage Kategori Madya (terbaik se-Sulawesi Utara)

## PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 ini dibuat dan disampaikan sebagai gambaran tentang Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama Tahun 2025, dengan kesadaran bahwa apa yang disajikan dalam laporan ini adalah capaian nyata dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang didukung oleh berbagai pihak, untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, patut disampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama ini dalam membangun Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tercinta.

Kiranya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 ini akan menjadi bahan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk terus meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

***Somahe Kai Kehage,***

***Wassalamu Alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh;***

***Shalom !***

P. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



MICHAEL THUNGARI, S.E., M.M

# RLPPD 2025

